



# LAPORAN KINERJA (LKj)

**Badan Pengelolaan Keuangan Aceh  
Tahun 2024**



# Laporan Kinerja 2024 BPKA

## IKHTISAR EKSEKUTIF



Untuk mencapai tujuan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh seperti yang tertuang pada Rencana Strategis (RENSTRA) 2023-2026 Badan Pengelolaan Keuangan Aceh yang mengacu pada Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026 yakni *mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas dan fungsional* dengan sasaran mempertahankan opini audit BPK atas laporan keuangan pada level WTP dengan cara meningkatkan pengawasan internal pelaksanaan APBA melalui transparansi tata kelola dan peningkatan SDM aparatur serta *meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, kemandirian fiskal daerah dan ketahanan pangan dalam upaya mengurangi dampak sosial ekonomi Covid-19* dengan sasaran intensifikasi dan ekstensifikasi dana pembangunan dengan cara meningkatkan sumber-sumber pendapatan untuk pembangunan Aceh.

Secara keseluruhan, upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Aceh telah menunjukkan hasil kinerja yang positif. Ini terbukti dengan berhasilnya Pemerintah Aceh menerima predikat WTP atas Laporan Keuangan untuk kesembilan kalinya di Tahun 2023, serta rata-rata pertumbuhan Pendapatan Asli Aceh dalam 5 (lima) tahun terakhir sebesar 4,37%.

Pada Tahun Anggaran 2024, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja, sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja antara Gubernur Aceh dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Tahun 2024. Dari perhitungan rata-rata kinerja atau akumulatif kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Tahun Anggaran 2024 mencapai persentase 53,70%.

# Laporan Kinerja 2024 BPKA

Hal yang menjadi perhatian bersama untuk menjadi acuan bagi peningkatan kinerja di tahun-tahun mendatang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, antara lain:

1. Meningkatkan komitmen atas seluruh kebijakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara konsisten dan konsekuen, dengan pemantapan koordinasi atas penetapan tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan Aceh;
2. Keberhasilan yang dicapai Badan Pengelolaan Keuangan Aceh bukan semata-mata karena kapabilitas dan kompetensi ataupun keunggulan aparatur, tetapi juga karena adanya konsistensi dari jajaran pimpinan dalam melakukan manajemen dan kontrol yang baik serta kerjasama tim work yang dibangun dengan dasar saling mendukung dan percaya;
3. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus lebih fokus kepada target-target yang telah ditetapkan, serta membangun komunikasi yang aktif baik antara sesama bawahan, maupun antara bawahan dan pimpinan, sehingga semua kendala dan hambatan yang dialami dalam pelaksanaan tugas dapat segera diselesaikan.

# **Laporan Kinerja 2024 BPKA**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya sehingga Badan Pengelolaan Keuangan Aceh dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024, yang akan digunakan sebagai media informasi dalam rangka mengukur sejauh mana tingkat keberhasilan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh dalam melaksanakan kegiatannya sesuai dengan target yang ingin dicapai. Laporan Kinerja ini disusun sebagai upaya memenuhi amanah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyusunan laporan kinerja ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban formal atas seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang berkaitan dengan tujuan yang telah ditetapkan Satuan Kerja Perangkat Aceh di dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Daerah dengan Kepala SKPA.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 merupakan gambaran realisasi kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Tahun 2024 sekaligus sebagai tolak ukur dan bahan untuk melakukan perbaikan atau peningkatan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh secara berkesinambungan.

Kritik dan saran senantiasa kami nantikan demi perbaikan dan penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengelolaan

# **Laporan Kinerja 2024 BPKA**

Keuangan Aceh untuk tahun-tahun yang akan datang dan dapat memberikan informasi sebagai parameter untuk lebih memacu peningkatan kinerja aparatur Badan Pengelolaan Keuangan Aceh dan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk bahan perbaikan selanjutnya dan peningkatan kinerja di masa mendatang.

Banda Aceh, 2025  
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh

**REZA SAPUTRA, SSTP, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19800103 199810 1 002



# Laporan Kinerja 2024 BPKA

## DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF.....	i
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi .....	2
1.3 Struktur Organisasi .....	4
1.4 Permasalahan dan Isu Strategis .....	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	20
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama OPD.....	20
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan.....	22
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	26
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	27
1. Pengukuran kinerja berdasarkan target dan realisasi kinerja tahun berkenaan.....	29
2. Pengukuran kinerja berdasarkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.	31
3. Pengukuran kinerja berdasarkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi .....	33
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.....	34
5. Prestasi Daerah/Penghargaan .....	36
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	37
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja .....	38
B. Realisasi Anggaran .....	42
BAB IV PENUTUP .....	45
4.1 Kesimpulan.....	45
4.2 Upaya dimasa mendatang.....	46
LAMPIRAN	
1. Pengukuran Kinerja	
2. Perjanjian Kinerja	

# Laporan Kinerja 2024 BPKA

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Review atas Laporan Kinerja, di mana diatur bahwa setiap instansi pemerintah wajib untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai pertanggungjawaban pencapaian sasaran/tujuan strategi instansi. Siklus laporan kinerja diawali dengan penyusunan rencana strategik yang mendefinisikan tujuan, sasaran serta program Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, yang kemudian pada setiap tahunnya ditetapkan dalam bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Setelah itu, pada setiap akhir periode pengukuran kinerja dilaksanakan untuk menilai sejauh mana pencapaian kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Disamping itu penyusunan Laporan Kinerja ini juga bertujuan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Pengelola Keuangan Aceh untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

Laporan Kinerja disusun dalam rangka upaya mewujudkan good goverment dan merupakan sebuah pendekatan management berbasis kinerja dalam rangka memberikan informasi kinerja untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi Pemerintah yang baik untuk itu perlu disusun laporan kinerja pada setiap akhir tahun.

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Tahun 2024, adalah perwujudan kewajiban Badan Pengelolaan Keuangan Aceh

# Laporan Kinerja 2024 BPKA

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2024, serta akan digunakan sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh di tahun yang akan datang.

## 1.2 Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) dibentuk dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 01 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah. Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas tersebut merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Seperti tertuang pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 01 Tahun 2024, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh merupakan unsur pendukung pemerintahan pada Pemerintah Aceh yang melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pengelolaan keuangan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Secara umum tugas, fungsi dan kewenangan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah dan organisasi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat. Karena itu, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh mempunyai peranan yang vital dalam mendukung peran strategis pemerintah Aceh untuk mewujudkan visi dan misinya.

Badan Pengelolaan Keuangan Aceh melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan bidang pendapatan, anggaran, barang dan kekayaan milik Aceh, perbendaharaan, akuntansi dan pembinaan

## **Laporan Kinerja 2024 BPKA**

serta evaluasi anggaran kabupaten/kota sesuai dengan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Badan Pengelolaan Keuangan Aceh mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
2. Pelaksanaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
3. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan;
4. Pelaksanaan pengelolaan keuangan bidang pendapatan;
5. Pelaksanaan pengelolaan keuangan bidang anggaran;
6. Pelaksanaan pengelolaan keuangan bidang barang dan kekayaan milik Aceh;
7. Pelaksanaan pengelolaan keuangan bidang perbendaharaan;
8. Pelaksanaan pengelolaan keuangan bidang akuntansi;
9. Pelaksanaan pembinaan dan evaluasi anggaran kabupaten/kota;
10. Pelaksanaan penyiapan bahan kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
11. Pelaksanaan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran;
12. Pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
13. Pengoordinasian dan pengendalian alokasi anggaran/belanja tambahan penghasilan pegawai ASN;
14. Pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusun petunjuk teknis tentang sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
15. Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh oleh Bank dan atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
16. Pelaksanaan dan pengkoordinasian pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
17. Pelaksanaan penempatan uang mengelola/menatausahakan investasi;
18. Pelaksanaan dan pengkoordinasian pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran;

# Laporan Kinerja 2024 BPKA

19. Pelaksanaan dan pengendalian sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Aceh;
20. Pelaksanaan penyajian informasi keuangan Aceh;
21. Pelaksanaan Penatausahaan Asset Aceh; dan
22. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pengelolaan keuangan Aceh.

## 1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Aceh berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 01 Tahun 2024 terdiri dari:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, yang membawahi:
  - a. Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum.
3. Bidang Pendapatan, yang membawahi:
  - a. Subbidang Dana Perimbangan dan Lain Pendapatan Yang Sah; dan
  - b. Subbidang Pengembangan Pendapatan Asli Aceh.
4. Bidang Anggaran Aceh, yang membawahi:
  - a. Subbidang Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia; dan
  - b. Subbidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan.
5. Bidang Pengelolaan Barang Milik Aceh, yang membawahi:
  - a. Subbidang Penatausahaan Barang Milik Aceh; dan
  - b. Subbidang Legalitas dan Pengamanan Barang Milik Aceh.
6. Bidang Perbendaharaan, yang membawahi:
  - a. Subbidang Perbendaharaan I; dan
  - b. Subbidang Perbendaharaan II.
7. Bidang Akuntansi, yang membawahi:
  - a. Subbidang Akuntansi I; dan
  - b. Subbidang Akuntansi II.
8. Bidang Pembinaan dan Evaluasi Anggaran Kabupaten/Kota, yang membawahi:
  - a. Subbidang Wilayah I; dan

## **Laporan Kinerja 2024 BPKA**

b. Subbidang Wilayah II.

9. UPTD Pengelolaan Pendapatan Aceh yang terbagi atas :

a. UPTD Kelas A, yang terdiri dari :

1. UPTD Wilayah I Kota Banda Aceh;
2. UPTD Wilayah II Kabupaten Aceh Besar;
3. UPTD Wilayah III Kabupaten Pidie;
4. UPTD Wilayah IV Kabupaten Bireuen;
5. UPTD Wilayah V Kota Lhokseumawe;
6. UPTD Wilayah VI Kabupaten Aceh Utara;
7. UPTD Wilayah VII Kabupaten Aceh Timur;
8. UPTD Wilayah VIII Kota Langsa;
9. UPTD Wilayah IX Kabupaten Aceh Tamiang;
10. UPTD Wilayah X Kabupaten Bener Meriah;
11. UPTD Wilayah XI Kabupaten Aceh Tengah;
12. UPTD Wilayah XII Kabupaten Aceh Barat;
13. UPTD Wilayah XIII Kabupaten Nagan Raya;
14. UPTD Wilayah XIV Kabupaten Aceh Barat Daya; dan
15. UPTD Wilayah XV Kabupaten Aceh Selatan.

Dengan Susunan organisasi sebagai berikut :

- 1) Kepala UPTD;
- 2) Subbagian Tata Usaha;
- 3) Seksi Pendataan dan Penetapan;
- 4) Seksi Pembayaran dan Penagihan; dan
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional.

b. UPTD Kelas B, yang terdiri dari :

1. UPTD Wilayah XVI Kabupaten Pidie Jaya;
2. UPTD Wilayah XVII Kota Sabang;
3. UPTD Wilayah XVIII Kabupaten Aceh Jaya;
4. UPTD Wilayah XIX Kota Subulussalam;
5. UPTD Wilayah XX Kabupaten Aceh Singkil;

# Laporan Kinerja 2024 BPKA

6. UPTD Wilayah XXI Kabupaten Gayo Lues;
7. UPTD Wilayah XXII Kabupaten Aceh Tenggara;
8. UPTD Wilayah XXIII Kabupaten Simeulue.

Dengan Susunan organisasi sebagai berikut :

- 1) Kepala UPTD;
- 2) Subbagian Tata Usaha; dan
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional.

## 10. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional maka sesuai Keputusan Gubernur Aceh Nomor Peg.821.22/104/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Pemberhentian dari Jabatan Administrasi serta Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional melalui mekanisme penyetaraan di Lingkungan Pemerintah Aceh, adapun Jabatan Fungsional pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh berjumlah 8 (delapan) orang yaitu:

Tabel 1.1  
Jabatan Fungsional pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Fungsional Perencana Ahli Muda pada Subbagian Penyusunan Program	1 Orang
2	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Subbagian Keuangan	1 Orang
3	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Bidang Anggaran	1 Orang
4	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Bidang Perbendaharaan	1 Orang
5	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Bidang Akuntansi	1 Orang
6	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Bidang Pembinaan dan Evaluasi Anggaran Kab/Kota	1 Orang
7	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Bidang Pendapatan	1 Orang
8	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Pengelolaan Barang Milik Aceh	1 Orang



# Laporan Kinerja 2024 BPKA

Sumber daya manusia terdiri dari dua hal, yaitu daya fisik dan daya pikir yang nantinya akan menentukan kemampuan manusia. Dalam suatu aktivitas, manusia adalah unsur utamanya, tidak peduli meskipun banyak peralatan canggih yang sudah bisa bekerja secara instan, namun peralatan tersebut tidak akan bisa berfungsi jika tidak dikelola oleh manusia. Sehingga sumber daya manusia sangat dibutuhkan untuk memenuhi tujuan yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, agar bakat dan kemampuannya dapat bermanfaat secara utuh, maksimal, dan tepat sasaran melalui metode-metode dan sistem yang efektif dan efisien.

Sumber daya manusia (pegawai) yang dimiliki Badan Pengelolaan Keuangan Aceh untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan daerah per 01 Januari 2024 berjumlah 355 orang dengan klasifikasi sebagai berikut :

- Menurut Pangkat/Golongan dalam Bidang/UPTD, sebagai berikut :

Tabel 1.2  
Proporsi ASN berdasarkan Pangkat/Golongan dalam Bidang/UPTD

NO	BIDANG	PANGKAT/GOLONGAN				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Kepala Badan	-	-	-	1	1
2	Sekretariat		4	41	3	48
3	Bidang Pendapatan			22	6	28
4	Bidang Anggaran Daerah		1	10	1	12
5	Bidang Perbendaharaan		2	22	5	29
6	Bidang Pengelolaan Barang Milik Aceh			14	7	21
7	Bidang Akuntansi		2	12	3	17
8	Bidang Pembinaan dan Evaluasi Anggaran Kab/Kota			12	3	15
9	UPTD I Banda Aceh			18	3	21
10	UPTD II Aceh Besar		2	15		17
11	UPTD III Pidie			13	2	15
12	UPTD IV Bireuen		1	11	2	14
13	UPTD V Lhokseumawe			4	2	6
14	UPTD VI Aceh Utara			6	1	7
15	UPTD VII Aceh Timur			5	1	6
16	UPTD VIII Langsa			9	1	10
17	UPTD IX Aceh Tamiang		1	6	2	9
18	UPTD X Bener Meriah			7	1	8
19	UPTD XI Aceh Tengah		1	7	1	9

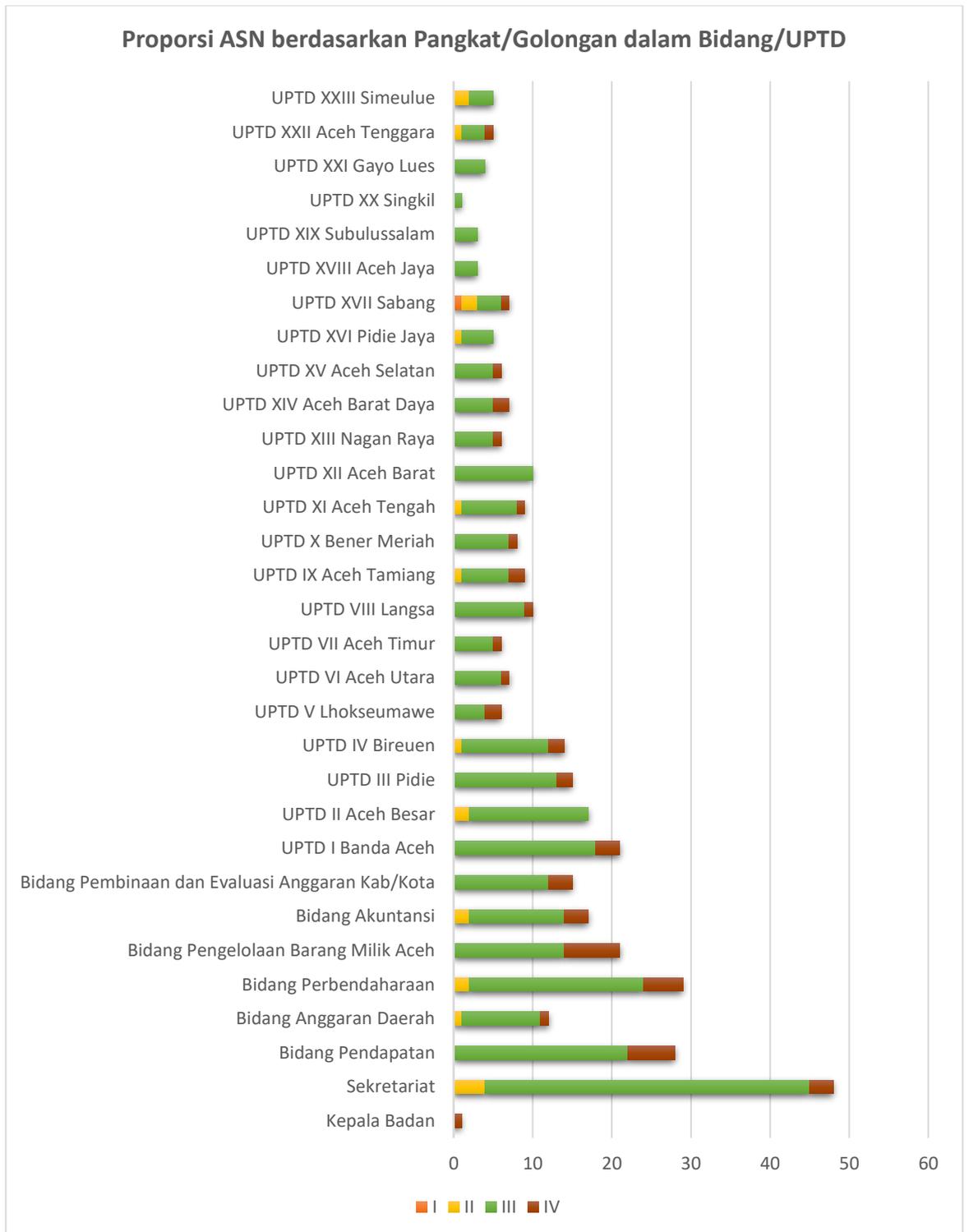
## Laporan Kinerja 2024 BPKA

NO	BIDANG	PANGKAT/GOLONGAN				
		I	II	III	IV	JUMLAH
20	UPTD XII Aceh Barat			10		10
21	UPTD XIII Nagan Raya			5	1	6
22	UPTD XIV Aceh Barat Daya			5	2	7
23	UPTD XV Aceh Selatan			5	1	6
24	UPTD XVI Pidie Jaya		1	4		5
25	UPTD XVII Sabang	1	2	3	1	7
26	UPTD XVIII Aceh Jaya			3		3
27	UPTD XIX Subulussalam			3		3
28	UPTD XX Singkil			1		1
29	UPTD XXI Gayo Lues			4		4
30	UPTD XXII Aceh Tenggara		1	3	1	5
31	UPTD XXIII Simeulue		2	3		5
	<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>283</b>	<b>51</b>	<b>355</b>

Berdasarkan tabel di atas, jumlah pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Aceh berjumlah 355 orang dengan jumlah terbanyak ada di Sekretariat sebanyak 48 orang, dan pangkat/golongan terbanyak ada di golongan III sebanyak 283 orang.



# Laporan Kinerja 2024 BPKA



Gambar 1.1 Proporsi ASN berdasarkan Pangkat/Golongan dalam Bidang/UPTD

# Laporan Kinerja 2024 BPKA

- Menurut Jenis Kelamin dalam Bidang/UPTD, sebagai berikut :

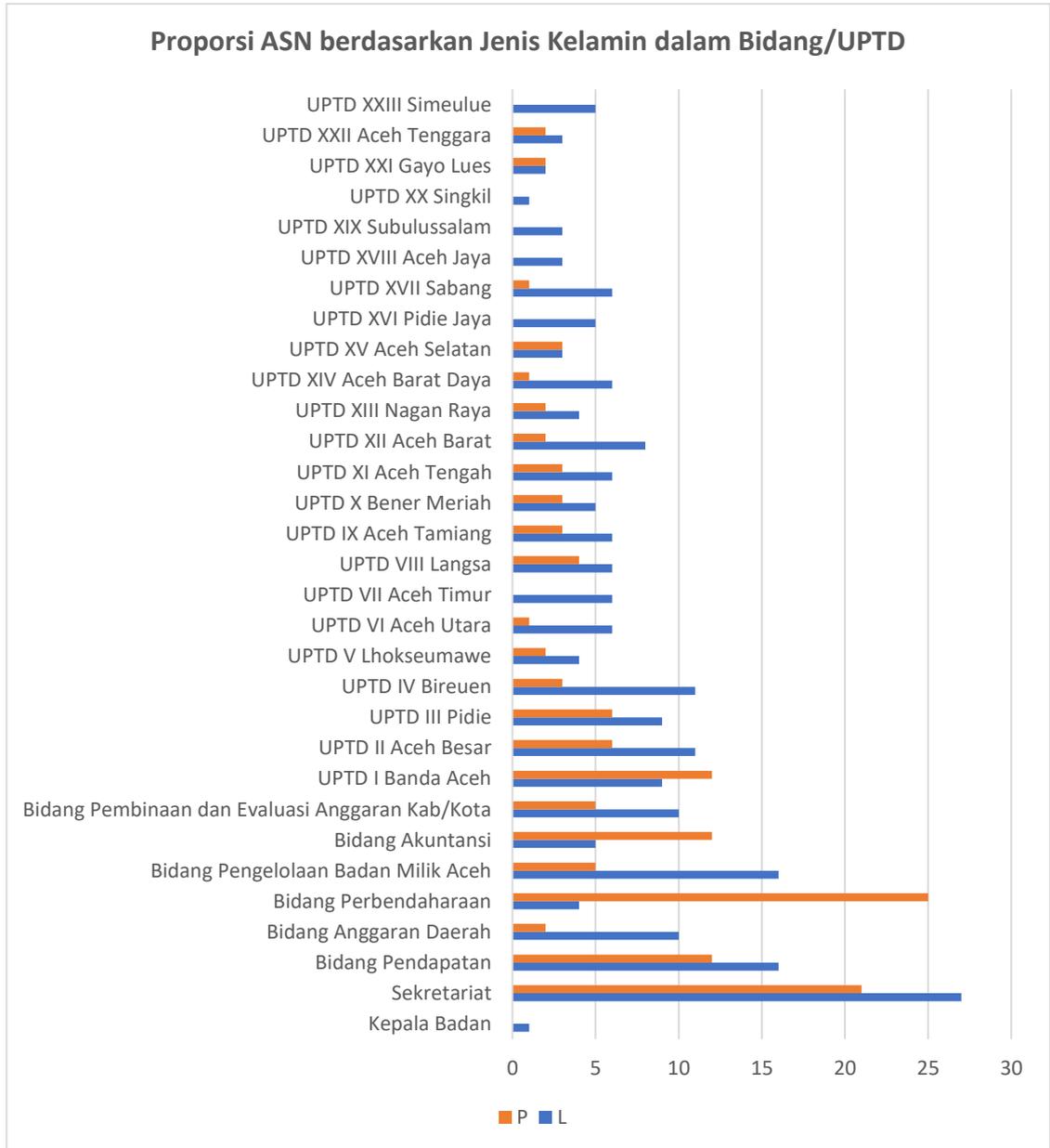
Tabel 1.3  
Proporsi ASN berdasarkan Jenis Kelamin dalam Bidang/UPTD

NO	BIDANG	JENIS KELAMIN				JUMLAH
		L	%	P	%	
1	Kepala Badan	1	0,28	0	0,00	1
2	Sekretariat	27	7,61	21	5,92	48
3	Bidang Pendapatan	16	4,51	12	3,38	28
4	Bidang Anggaran Daerah	10	2,82	2	0,56	12
5	Bidang Perbendaharaan	4	1,13	25	7,04	29
6	Bidang Pengelolaan Badan Milik Aceh	16	4,51	5	1,41	21
7	Bidang Akuntansi	5	1,41	12	3,38	17
8	Bidang Pembinaan dan Evaluasi Anggaran Kab/Kota	10	2,82	5	1,41	15
9	UPTD I Banda Aceh	9	2,54	12	3,38	21
10	UPTD II Aceh Besar	11	3,10	6	1,69	17
11	UPTD III Pidie	9	2,54	6	1,69	15
12	UPTD IV Bireuen	11	3,10	3	0,85	14
13	UPTD V Lhokseumawe	4	1,13	2	0,56	6
14	UPTD VI Aceh Utara	6	1,69	1	0,28	7
15	UPTD VII Aceh Timur	6	1,69		0,00	6
16	UPTD VIII Langsa	6	1,69	4	1,13	10
17	UPTD IX Aceh Tamiang	6	1,69	3	0,85	9
18	UPTD X Bener Meriah	5	1,41	3	0,85	8
19	UPTD XI Aceh Tengah	6	1,69	3	0,85	9
20	UPTD XII Aceh Barat	8	2,25	2	0,56	10
21	UPTD XIII Nagan Raya	4	1,13	2	0,56	6
22	UPTD XIV Aceh Barat Daya	6	1,69	1	0,28	7
23	UPTD XV Aceh Selatan	3	0,85	3	0,85	6
24	UPTD XVI Pidie Jaya	5	1,41		0,00	5
25	UPTD XVII Sabang	6	1,69	1	0,28	7
26	UPTD XVIII Aceh Jaya	3	0,85		0,00	3
27	UPTD XIX Subulussalam	3	0,85		0,00	3
28	UPTD XX Singkil	1	0,28		0,00	1
29	UPTD XXI Gayo Lues	2	0,56	2	0,56	4
30	UPTD XXII Aceh Tenggara	3	0,85	2	0,56	5
31	UPTD XXIII Simeulue	5	1,41		0,00	5
	<b>TOTAL</b>	<b>217</b>	<b>61,13</b>	<b>138</b>	<b>38,87</b>	<b>355</b>

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Badan Pengelolaan Keuangan Aceh didominasi oleh Laki-laki sebanyak 217 orang atau 61,13%. Jumlah Laki-laki ada di Sekretariat sebanyak 27 orang atau 7,61%

# Laporan Kinerja 2024 BPKA

dan jumlah Perempuan ada di Bidang Perbendaharaan sebanyak 25 orang atau 7,04%.



Gambar 1.2 Proporsi ASN berdasarkan Jenis Kelamin dalam Bidang/UPTD

# Laporan Kinerja 2024 BPKA

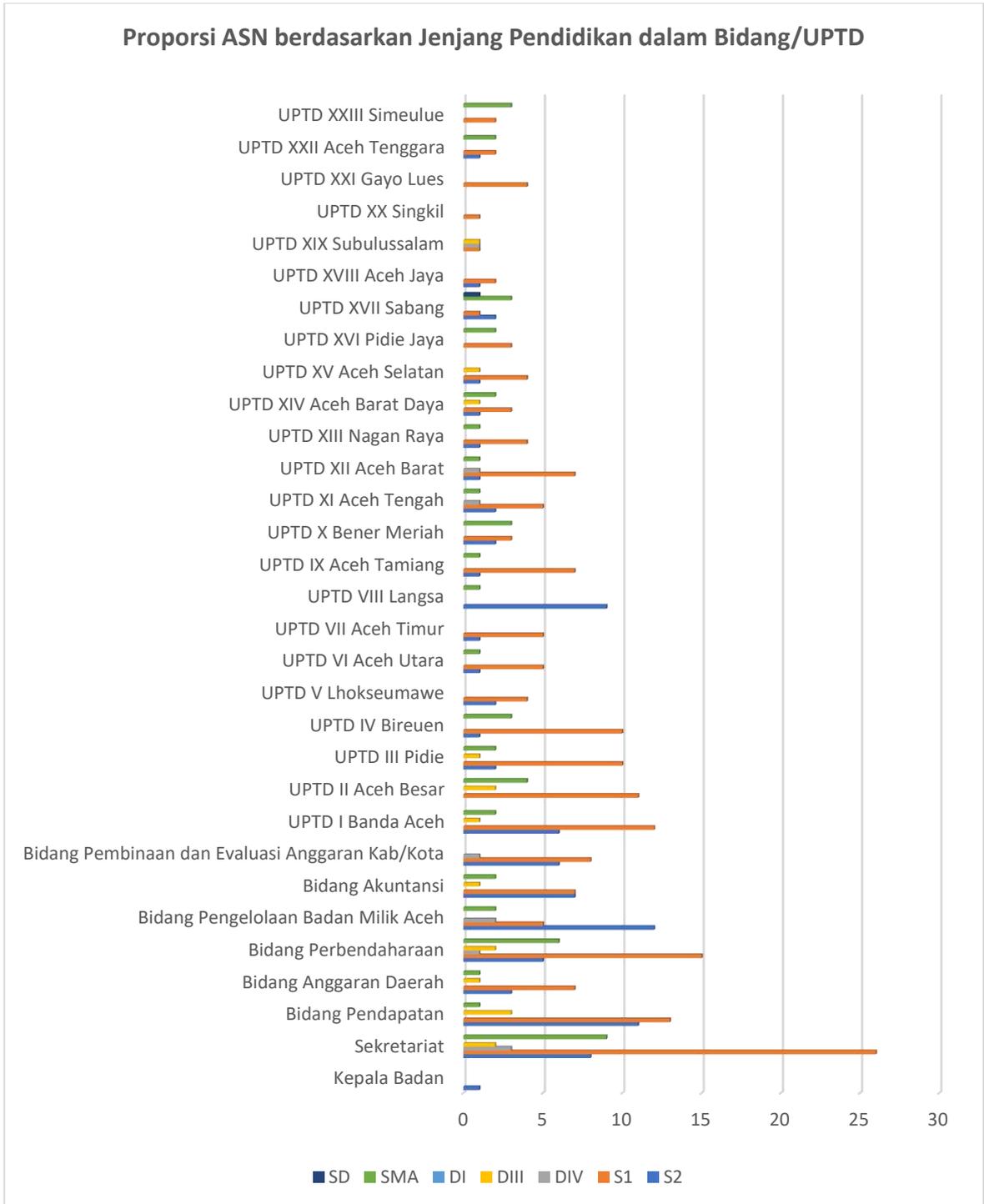
- Menurut Jenjang Pendidikan dalam Bidang/UPTD, sebagai berikut :

Tabel 1.4  
Proporsi ASN berdasarkan Jenjang Pendidikan dalam Bidang/UPTD

NO	BIDANG	JENJANG PENDIDIKAN							JUMLAH
		S2	S1	DIV	DIII	DI	SMA	SD	
1	Kepala Badan	1							1
2	Sekretariat	8	26	3	2		9		48
3	Bidang Pendapatan	11	13		3		1		28
4	Bidang Anggaran Daerah	3	7		1		1		12
5	Bidang Perbendaharaan	5	15	1	2		6		29
6	Bidang Pengelolaan Badan Milik Aceh	12	5	2			2		21
7	Bidang Akuntansi	7	7		1		2		17
8	Bidang Pembinaan dan Evaluasi Anggaran Kab/Kota	6	8	1					15
9	UPTD I Banda Aceh	6	12		1		2		21
10	UPTD II Aceh Besar		11		2		4		17
11	UPTD III Pidie	2	10		1		2		15
12	UPTD IV Bireuen	1	10				3		14
13	UPTD V Lhokseumawe	2	4						6
14	UPTD VI Aceh Utara	1	5				1		7
15	UPTD VII Aceh Timur	1	5						6
16	UPTD VIII Langsa	9					1		10
17	UPTD IX Aceh Tamiang	1	7				1		9
18	UPTD X Bener Meriah	2	3				3		8
19	UPTD XI Aceh Tengah	2	5	1			1		9
20	UPTD XII Aceh Barat	1	7	1			1		10
21	UPTD XIII Nagan Raya	1	4				1		6
22	UPTD XIV Aceh Barat Daya	1	3		1		2		7
23	UPTD XV Aceh Selatan	1	4		1				6
24	UPTD XVI Pidie Jaya		3				2		5
25	UPTD XVII Sabang	2	1				3	1	7
26	UPTD XVIII Aceh Jaya	1	2						3
27	UPTD XIX Subulussalam		1	1	1				3
28	UPTD XX Singkil		1						1
29	UPTD XXI Gayo Lues		4						4
30	UPTD XXII Aceh Tenggara	1	2				2		5
31	UPTD XXIII Simeulue		2				3		5
	<b>TOTAL</b>	<b>88</b>	<b>187</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>1</b>	<b>355</b>

Dari tabel di atas terlihat bahwa jenjang pendidikan Sarjana (S1) merupakan penyumbang jumlah pegawai terbanyak pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh yaitu 187 orang atau 52,68% dari jumlah pegawai. Dan posisi terbanyak berada di Sekretariat.

# Laporan Kinerja 2024 BPKA



Gambar 1.3 Proporsi ASN berdasarkan Jenjang Pendidikan dalam Bidang/UPTD

# Laporan Kinerja 2024 BPKA

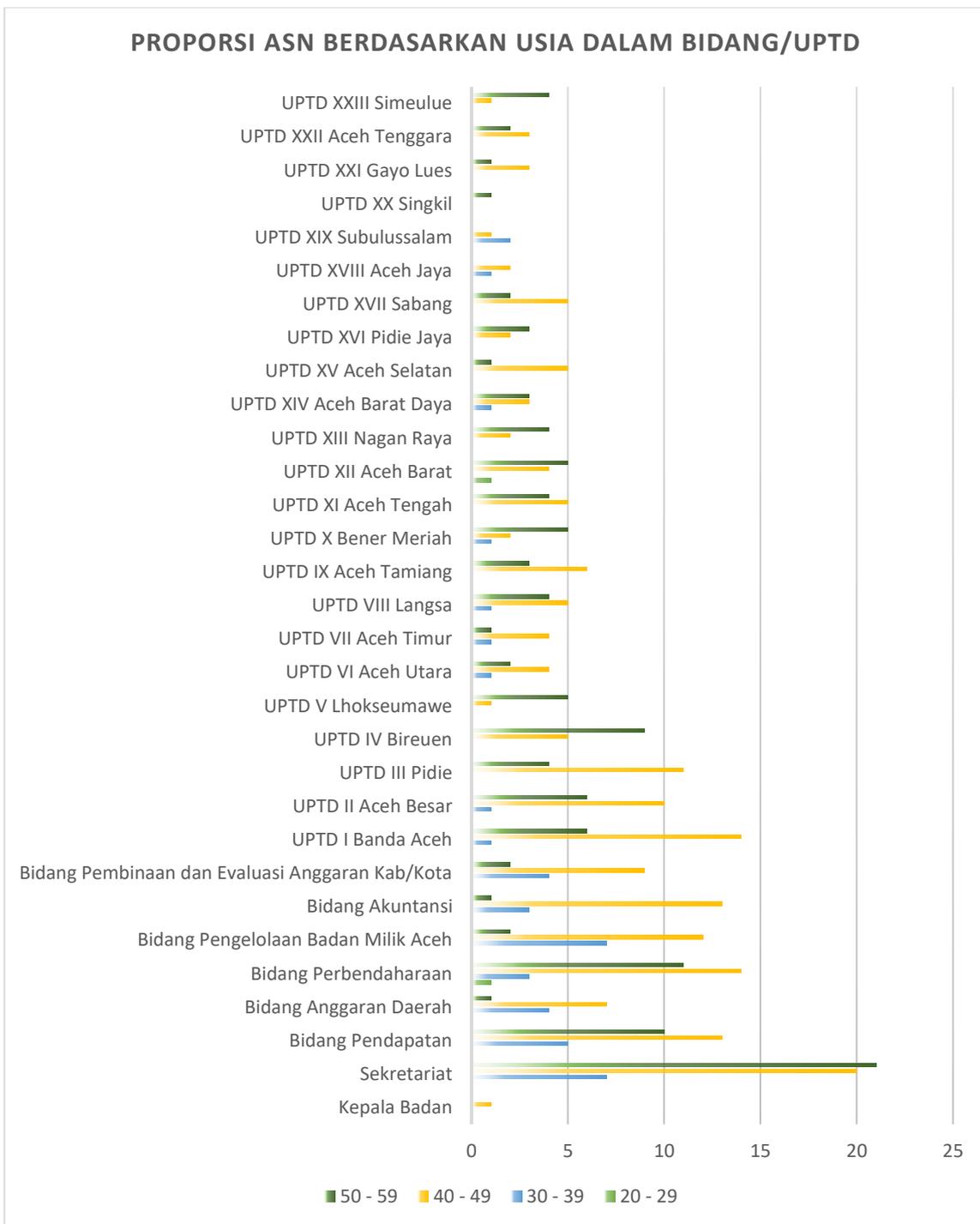
- Menurut Usia dalam Bidang/UPTD, sebagai berikut :

Tabel 1.4  
Proporsi ASN berdasarkan Usia dalam Bidang/UPTD

NO	BIDANG	USIA				JUMLAH
		20 - 29	30 - 39	40 - 49	50 - 59	
1	Kepala Badan			1		1
2	Sekretariat		7	20	21	48
3	Bidang Pendapatan		5	13	10	28
4	Bidang Anggaran Daerah		4	7	1	12
5	Bidang Perbendaharaan	1	3	14	11	29
6	Bidang Pengelolaan Badan Milik Aceh		7	12	2	21
7	Bidang Akuntansi		3	13	1	17
8	Bidang Pembinaan dan Evaluasi Anggaran Kab/Kota		4	9	2	15
9	UPTD I Banda Aceh		1	14	6	21
10	UPTD II Aceh Besar		1	10	6	17
11	UPTD III Pidie			11	4	15
12	UPTD IV Bireuen			5	9	14
13	UPTD V Lhokseumawe			1	5	6
14	UPTD VI Aceh Utara		1	4	2	7
15	UPTD VII Aceh Timur		1	4	1	6
16	UPTD VIII Langsa		1	5	4	10
17	UPTD IX Aceh Tamiang			6	3	9
18	UPTD X Bener Meriah		1	2	5	8
19	UPTD XI Aceh Tengah			5	4	9
20	UPTD XII Aceh Barat	1		4	5	10
21	UPTD XIII Nagan Raya			2	4	6
22	UPTD XIV Aceh Barat Daya		1	3	3	7
23	UPTD XV Aceh Selatan			5	1	6
24	UPTD XVI Pidie Jaya			2	3	5
25	UPTD XVII Sabang			5	2	7
26	UPTD XVIII Aceh Jaya		1	2		3
27	UPTD XIX Subulussalam		2	1		3
28	UPTD XX Singkil				1	1
29	UPTD XXI Gayo Lues			3	1	4
30	UPTD XXII Aceh Tenggara			3	2	5
31	UPTD XXIII Simeulue			1	4	5
	<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>43</b>	<b>187</b>	<b>123</b>	<b>355</b>

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa kelompok usia 40 – 49 tahun mendominasi jumlah pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Aceh yaitu 187 orang atau 52,68% dan yang terbanyak berada di Sekretariat.

# Laporan Kinerja 2024 BPKA



Gambar 1.4 Proporsi ASN berdasarkan Usia dalam Bidang/UPTD

# Laporan Kinerja 2024 BPKA

- Jumlah Tenaga Kontrak, Tenaga Keamanan dan Tenaga Kebersihan dalam Bidang/UPTD, sebagai berikut :

Tabel 1.5  
Jumlah Tenaga Kontrak, Tenaga Keamanan dan Tenaga Kebersihan dalam Bidang/UPTD

NO	BIDANG	JUMLAH TEKON	TENAGA KEAMANAN	TENAGA KEBERSIHAN	JUMLAH
1	Sekretariat	43	10	6	59
2	Bidang Pendapatan	10			10
3	Bidang Anggaran Daerah	9			9
4	Bidang Perbendaharaan	13			13
5	Bidang Pengelolaan Badan Milik Aceh	12			12
6	Bidang Akuntansi	9			9
7	Bidang Pembinaan dan Evaluasi Anggaran Kab/Kota	9			9
8	UPTD I Banda Aceh	30	6	4	40
9	UPTD II Aceh Besar	21	4	2	27
10	UPTD III Pidie	11	4		15
11	UPTD IV Bireuen	11	3	1	15
12	UPTD V Lhokseumawe	17	1	1	19
13	UPTD VI Aceh Utara	10	3	1	14
14	UPTD VII Aceh Timur	4	3	2	9
15	UPTD VIII Langsa	5	4	2	11
16	UPTD IX Aceh Tamiang	1	3	1	5
17	UPTD X Bener Meriah	2	3	1	6
18	UPTD XI Aceh Tengah	4	4	2	10
19	UPTD XII Aceh Barat	3	3	1	7
20	UPTD XIII Nagan Raya	4	3		7
21	UPTD XIV Aceh Barat Daya	4	1	1	6
22	UPTD XV Aceh Selatan	2	4	1	7
23	UPTD XVI Pidie Jaya	8	2	1	11
24	UPTD XVII Sabang	1	2	1	4
25	UPTD XVIII Aceh Jaya	2	2	1	5
26	UPTD XIX Subulussalam	1	2		3
27	UPTD XX Singkil	2	1		3
28	UPTD XXI Gayo Lues	2	2	1	5
29	UPTD XXII Aceh Tenggara	3	2		5
30	UPTD XXIII Simeulue	3	2		5
	<b>TOTAL</b>	<b>256</b>	<b>74</b>	<b>30</b>	<b>360</b>

# Laporan Kinerja 2024 BPKA

## 1.4 Permasalahan dan Isu Strategis

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, maka peran Badan Pengelolaan Keuangan Aceh sangatlah penting dalam pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset Aceh mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pencairan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBA namun peran penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh sarana dan prasarana serta sumber daya yang memadai dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan.

Adapun masalah yang dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan Aceh seperti yang tertuang pada Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026 adalah :

- (1) Pendanaan pembangunan Aceh masih bertumpu pada anggaran pemerintah (dana transfer) sebesar 82,27 persen dari total APBA;
- (2) Berkurangnya Dana Otonomi Khusus yang menyebabkan terganggunya pendanaan pembangunan Aceh terutama sektor pengentasan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan serta pemeliharaan infrastruktur. Penurunan tersebut mulai tahun 2023 sebesar 50 persen (1 persen dari DAU Nasional) dan pada tahun 2028 menjadi 0 persen;
- (3) Peruntukan dana Otsus belum sesuai dengan peraturan yang berlaku dimana untuk kegiatan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masih rata-rata di bawah 5 persen dari jumlah APBA;
- (4) Banyak potensi pembiayaan dan kemitraan yang belum dioptimalkan pemanfaatannya (diantaranya PEN, TJSLP, PPP).

Berdasarkan data realisasi kegiatan yang ada selama ini maka dapat memberikan gambaran bahwa jumlah dana yang diperlukan semakin meningkat seiring dengan tuntutan pembangunan dan pelayanan yang semakin kompleks. Dengan berkurangnya Dana Otonomi Khusus menjadi 1(satu) persen dari DAU mulai tahun 2023 dan akan menjadi nol pada tahun 2027. Maka Pemerintah Aceh perlu upaya untuk mendapatkan

## **Laporan Kinerja 2024 BPKA**

sumber-sumber pembiayaan alternatif untuk mendanai pembangunan Aceh.

Sehingga permasalahan utama yang dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan Aceh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah berkurangnya Dana Otonomi Khusus mulai tahun 2023 yang menyebabkan perlunya upaya peningkatan Pendapatan Asli Aceh (PAA) guna mendanai pembangunan Aceh.



# Laporan Kinerja 2024 BPKA

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama OPD

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Perencanaan kinerja adalah proses yang melibatkan pengidentifikasian tujuan, penentuan standar kinerja, pengembangan rencana tindakan, dan penentuan indikator evaluasi untuk mengarahkan dan mengelola kinerja individu, tim, atau organisasi secara efektif. Tujuan dari perencanaan kinerja adalah menciptakan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Dokumen rencana kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya. Selain itu, dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan, dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi atau sektor lain.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026, terdapat 2 (dua) tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Tahun 2023, yaitu :

1. Mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas dan fungsional dengan sasaran mempertahankan opini audit BPK atas laporan keuangan. Untuk memenuhi tujuan dan sasaran tersebut Badan Pengelolaan Keuangan Aceh memiliki 2 (dua) program prioritas yang menunjang tercapainya tujuan tersebut yaitu Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat, Kemandirian Fiskal Daerah dan Ketahanan Pangan dalam upaya mengurangi dampak sosial Ekonomi Covid-19 dengan sasaran

# Laporan Kinerja 2024 BPKA

intensifikasi dan ekstensifikasi dana pembangunan. Untuk memenuhi hal tersebut Badan Pengelolaan Keuangan Aceh mempunyai 1(satu) program prioritas yaitu Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Tabel 2.1  
Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke -			
				2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas dan Fungsional	Mempertahankan Opini audit BPK atas laporan keuangan pada level WTP	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat, Kemandirian Fiskal Daerah dan Ketahanan Pangan dalam upaya mengurangi dampak sosial Ekonomi Covid-19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Dana Pembangunan	Pertumbuhan 10 % per tahun (PAA)	10%	10%	10%	10%

Berdasarkan hal tersebut di atas, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh menetapkan Indikator Kinerja Utama yang merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menetapkan Rencana Kerja Anggaran, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Tahun 2023-2026.

Tabel 2.2  
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023 – 2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi/Cara Pengukuran	Penjelasan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
1	Mempertahankan Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan pada Level WTP	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Berdasarkan Hasil Penilaian BPK	Penilaian dilakukan setelah laporan keuangan diserahkan	BPKA

# Laporan Kinerja 2024 BPKA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi/Cara Pengukuran	Penjelasan	Sumber Data
2	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Dana Pembangunan	Pertumbuhan 10% per tahun (PAA)	$\frac{\text{PAA tahun berjalan} - \text{PAA tahun lalu}}{\text{PAA tahun lalu}} \times 100\%$	Kemampuan untuk mengukur, menggali potensi Pendapatan Asli Aceh agar dapat direalisasikan sesuai target	BPKA

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa ada 2 (dua) sasaran strategis pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh yaitu mempertahankan opini audit BPK atas Laporan Keuangan pada Level WTP dengan indikator kinerjanya Opini BPK terhadap Laporan Keuangan dan intensifikasi dan ekstensifikasi dana pembangunan dengan indikator kinerjanya pertumbuhan Pendapatan Asli Aceh (PAA) sebesar 10% per tahun.

## 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan suatu bentuk rumusan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang dapat meningkatkan kinerja. Arah kebijakan pembangunan merupakan suatu kondisi yang diharapkan dapat tercapai pada satu tahun pelaksanaan pembangunan. Adapun strategi dan arah kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh adalah seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.3  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas dan Fungsional	Mempertahankan Opini audit BPK atas laporan keuangan pada level WTP	Meningkatkan Akuntabilitas Pelaksanaan APBA	- Meningkatkan efektifitas serta akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah
			- Meningkatkan sistem anggaran, penatausahaan dan pelaporan yang menggunakan pendekatan belanja yang lebih baik yang fokus pada pelaksanaan program prioritas berbasis hasil serta efisiensi kebutuhan dasar
		Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	- Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja Badan Milik Daerah seperti keberadaan aset, bukti kepemilikan dan nilai aset
			- Menkuatkan APBA dengan meningkatkan PAD melalui pemanfaatan BMD, efisiensi biaya, potensi pajak.

# Laporan Kinerja 2024 BPKA

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat, Kemandirian Fiskal Daerah dan Ketahanan Pangan dalam upaya mengurangi dampak sosial Ekonomi Covid-19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Dana Pembangunan	Optimalisasi pendapatan, penguatan belanja yang lebih baik, dan inovasi pembiayaan menjadi kunci dalam rangka konsolidasi kebijakan fiskal yang siap dan berkelanjutan.	- Mengoptimalkan penggalian potensi PAA sebagai sumber pendapatan daerah
			- Meningkatkan Pelayanan PAA
			- Mengoptimalkan penagihan piutang pajakdaerah dan retribusi daerah dalam upaya percepatan penerimaan pendapatan daerah
			- Mengoptimalkan pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah
			- Meningkatkan pemahaman masyarakat, wajib pajak dan stakeholder lainnya dalam upaya peningkatan pendapatan daerah

Tujuan, sasaran, program dan indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Tahun Anggaran 2024 dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.4  
Rencana Kinerja BPKA Tahun Anggaran 2024

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KINERJA	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5	6	7
Terpenuhinya Sarana dan Prasarana yang Menunjang Urusan SKPA	Terselenggaranya tugas dan fungsi kedinasan serta pelayanan kepada masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Peningkatan Pengelolaan Keuangan Aceh	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	%	95%
Mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas dan Fungsional	Mempertahankan Opini audit BPK atas laporan keuangan pada level WTP	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tercapainya WTP Pemerintah Daerah	Penetapan APBA Tepat Waktu	Sesuai/ Tidak Sesuai	Sesuai
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Tercapainya Opini WTP di Pemerintah Aceh	Persentase Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan	%	62,50%
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat, Kemandirian Fiskal Daerah dan Ketahanan Pangan dalam upaya mengurangi dampak sosial Ekonomi Covid-19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Dana Pembangunan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAA terhadap total Pendapatan Aceh	Persentase Kemandirian Fiskal Aceh	%	21%

# Laporan Kinerja 2024 BPKA

## 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian kinerja adalah kesepakatan dan komitmen antara pimpinan unit kerja yang lebih tinggi dengan pimpinan unit kerja dibawahnya guna mencapai target kerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi, wewenang, serta sumber daya yang tersedia. Perumusan penetapan kinerja tersebut diikuti dengan program dan kegiatan serta anggaran yang dibutuhkan untuk mewujudkan sasaran, indikator kinerja dan target yang telah ditentukan.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

Dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) dengan Pj. Gubernur Aceh untuk mewujudkan target kinerja dimaksud (dokumen terlampir).

# Laporan Kinerja 2024 BPKA

Tabel. 2.5  
Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Mempertahankan opini audit BPK atas Laporan Keuangan pada Level WTP	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP
2.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Dana Pembangunan	Pertumbuhan per tahun APBA PAA	9,4% 5,4%
3.	Optimlisasi Potensi dan Realisasi Pendapatan Aceh	Persentase Kontribusi Pendapatan Asli Aceh terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh	26,3%



# **Laporan Kinerja 2024 BPKA**

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja digunakan untuk menilai kemampuan setiap unit organisasi dalam melaksanakan mandat yang diberikan oleh Kepala Daerah. Pelaksanaan mandat tersebut diwujudkan dalam prestasi kerja yang diukur berdasarkan tolok ukur keluaran dan hasil yang diperoleh atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Untuk menilai Akuntabilitas Kinerja diperlukan tolok ukur atau indikator kinerja. Capaian indikator kinerja ini akan dinilai, dianalisa dan dievaluasi tingkat keberhasilannya.

Akuntabilitas Kinerja diukur dari indikator kinerja melalui pengukuran sasaran, digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan suatu penilaian (assessment) yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Pengukuran kinerja dilakukan secara berkala per triwulan dan per tahun dengan sistem desk timbal balik yang dilaksanakan oleh unsur perencanaan, keuangan, pengawasan serta pengendalian pembangunan. Tujuan dilakukan pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Perangkat Daerah untuk mewujudkan sebagai visi dan misi Pemerintah Kota Serang. Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Perangkat Daerah tersebut menggunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

# Laporan Kinerja 2024 BPKA

## A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja dihasilkan dari pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut dimaksudkan untuk memberikan penghargaan maupun hukuman kepada pelaksana kegiatan, namun digunakan untuk menilai tingkat efektivitas hasil kerja yang dilaksanakan oleh satuan kerja guna meningkatkan kinerja organisasi. Analisa dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi. Pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan instansi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara melakukan perbandingan antara target rencana kinerja dengan realisasi kinerja yang telah dicapai.

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Pengukuran kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh meliputi pencapaian target indikator kinerja utama yang ditetapkan dalam penetapan kinerja tahunan. Dari hasil Pengukuran Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Tahun 2024 kita dapat melihat sejauh mana realisasi pencapaian IKU tersebut seperti yang tercantum pada tabel di bawah ini :

# Laporan Kinerja 2024 BPKA

Tabel 3.1  
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2024
1	2	3	4
1	Mempertahankan Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan pada Level WTP	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	-
2	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Dana Pembangunan	Pertumbuhan 10% per tahun (APBA, PAA)	4,64%

Sumber Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (unaudited)

Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2024 masih dalam proses penyusunan dan akan di serahkan kepada BPK pada akhir bulan Maret 2025. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) baru dapat kita ketahui setelah audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Aceh. Untuk opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2023, Pemerintah Aceh memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh dengan menekankan pada catatan atas belanja hibah tahun 2023 kepada KONI Aceh yang perlu diverifikasi lebih lanjut.

Pertumbuhan 10% pertahun (APBA, PAA) untuk Tahun Anggaran 2024 tidak dapat tercapai mengingat realisasi hanya naik sebesar 4,64% dibandingkan tahun lalu. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2024 hanya naik sebesar 0,44% dibandingkan tahun lalu, sedangkan Pendapatan Asli Aceh Tahun 2024 naik sebesar 8,85% jika dibandingkan dengan tahun lalu.

Akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh dengan Pj.Gubernur Aceh. Penilaian akuntabilitas kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan Aceh pada tahun 2024 diperoleh melalui analisis pengukuran dengan cara :

# Laporan Kinerja 2024 BPKA

## 1. Pengukuran kinerja berdasarkan target dan realisasi kinerja tahun berkenaan

Adapun pencapaian realisasi kinerja tahun 2024 berdasarkan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2  
Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1.	Mempertahankan opini audit BPK atas Laporan Keuangan pada Level WTP	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	-	-
2.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Dana Pembangunan	Pertumbuhan per tahun APBA PAA	9,4% 5,4%	0,44% 8,85%	0,047% 163,83%
3.	Optimisasi Potensi dan Realisasi Pendapatan Aceh	Persentase Kontribusi Pendapatan Asli Aceh terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh	26,3%	28,12%	106,93%

Sumber Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (unaudited)

Hasil pengukuran capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Tahun 2024 untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis disajikan sebagai berikut :

**SASARAN STRATEGIS 1** : Mempertahankan Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan pada Level WTP

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan beberapa pada kriteria yaitu:

1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
2. Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures);
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. Efektivitas sistem pengendalian intern.

Opini dihasilkan dari pemeriksaan keuangan yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan Pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk

# Laporan Kinerja 2024 BPKA

memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait.

Pasal 102 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengungkapkan bahwa Laporan Keuangan pelaksanaan APBD disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sehingga opini BPK atas audit laporan keuangan tahun 2024 belum ada disebabkan Laporan Keuangan Tahun 2024 masih dalam proses penyelesaian.

## **SASARAN STRATEGIS 2** : Intensifikasi dan Ekstensifikasi Dana Pembangunan

Pertumbuhan pertahun (APBA, PAA) untuk Tahun Anggaran 2024 tidak dapat tercapai mengingat realisasi pertumbuhan pertahun (APBA, PAA) hanya naik sebesar 4,64% dibandingkan tahun lalu. Hal ini disebabkan kenaikan APBA 2024 naik sebesar 0,44% yaitu Rp.11.672.120.348.557,- di tahun 2024 dan Rp.11.621.219.098.956,- di tahun 2023. Sedangkan Pendapatan Asli Aceh Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 8,85% jika dibandingkan dengan tahun lalu yaitu Rp. 3.282.595.357.976,67 di tahun 2024 dan Rp.2.992.188.692.203,88 di tahun 2023.

# Laporan Kinerja 2024 BPKA

## **SASARAN STRATEGIS 3** : Optimalisasi Potensi dan Realisasi Pendapatan Aceh

Persentase Kontribusi Pendapatan Asli Aceh terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dengan target 26,3% di tahun 2024 terealisasi sebesar 28,12% dengan persentase capaian 106,93%.

Sesuai Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2024 maka jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) Tahun 2024 sebesar Rp.11.672.120.348.557,- dengan realisasi sebesar Rp.10.561.959.745.744,20 atau 90,49%. Sedangkan jumlah anggaran Pendapatan Asli Aceh (PAA) Tahun 2024 sebesar Rp.3.019.019.705.316,- dengan realisasi sebesar Rp.3.282.595.357.976,67 atau 108,73%.

## 2. Pengukuran kinerja berdasarkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.3  
Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan beberapa tahun terakhir

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Capaian Kinerja		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1.	Mempertahankan opini audit BPK atas Laporan Keuangan pada Level WTP	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100%	100%	100%
2.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Dana Pembangunan	Pertumbuhan per tahun APBA	10%	10%	10%	3,97%	1,68%	(30,67%)	39,7%	16,8%	(3,07%)
		PAA	10%	10%	10%	(2,59%)	14,10%	2,38%	(0,26%)	141%	24%
3.	Optimalisasi Potensi dan Realisasi Pendapatan Aceh	Persentase Kontribusi Pendapatan Asli Aceh terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh	-	-	20%	15,20%	17,40%	25,70%	-	-	128,50%

Sumber Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (unaudited)

## **Laporan Kinerja 2024 BPKA**

Dengan dimulainya Rencana Pembangunan Aceh (RPA) 2023 – 2026 sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 dan Renstra 2023-2026 Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, maka pengukuran kinerja berdasarkan realisasi kinerja serta capaian kinerja akan dimulai tahun 2023.

Pemerintah Aceh memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di tahun 2023 merupakan ke sembilan kalinya secara berturut-turut.

Laporan Keuangan Pemerintah Aceh tahun 2024 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2023. Pemerintah Aceh bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disampaikan Pemerintah Aceh menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Aceh dan realisasi anggaran sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Satu hal yang ditekankan BPK adalah pada catatan atas Laporan Keuangan yang menjelaskan Belanja Hibah Tahun 2023 yang di dalamnya terdapat hibah kepada Koni Aceh yang terdapat bukti-bukti pertanggungjawaban persiapan Aceh menuju PON XXI/2024 yang perlu diverifikasi lebih lanjut. Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan tersebut, BPK melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

# Laporan Kinerja 2024 BPKA

### 3. Pengukuran kinerja berdasarkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.4  
Pengukuran Kinerja berdasarkan Realisasi Kinerja

No	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Tahun Anggaran 2024			Target Akhir RPA 2026	% Capaian RPA 2024
			Target 2024	Realisasi 2024	% Tingkat Capaian		
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	-	-	WTP	-
2	Pertumbuhan per Tahun (APBA dan PAA)	(0,014%)	10%	4,64%	0,46%	10%	0,46%
3	Persentase Kontribusi Pendapatan Asli Aceh terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh	128,50%	26,30%	28,12%	106,93%	34%	0,83%
Rata-rata persentase tingkat capaian					53,70		

Sumber Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (unaudited)

Belum adanya opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2024 menyebabkan pengukuran kinerja tidak dapat dilakukan dengan optimal.

Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2024 (Unaudited) akan diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat tanggal 31 Maret 2025. Selanjutnya akan dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhitung dari tanggal penyerahan. Hasil dari audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Aceh serta penyerahan opini paling lambat bulan Mei 2025.

# Laporan Kinerja 2024 BPKA

## 4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

**SASARAN STRATEGIS 1** : Mempertahankan Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan pada Level WTP

Kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran strategis ini adalah:

- a) Implementasi Aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) pada Pemerintah Daerah belum pada tahapan penyusunan laporan keuangan. Hal tersebut disebabkan kendala aplikasi;
- b) Terbatasnya SDM dengan latar pendidikan akuntansi yang memahami akuntansi berbasis akrual;
- c) Belum selesainya rekonsiliasi aset tetap;
- d) Untuk perhitungan penyusutan aset tetap belum adanya aplikasi;
- e) Masih lemahnya informasi yang diberikan oleh SKPA saat rekonsiliasi laporan keuangan.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang ada antara lain:

- Melaksanakan Bimtek dan Pelatihan dalam Penyusunan Laporan Keuangan;
- Adanya sosialisasi dan koordinasi dari pemerintah pusat mengenai perubahan-perubahan regulasi ataupun kebijakan;
- Melakukan pembinaan keuangan lainnya kepada SKPA seperti rekonsiliasi bulanan baik keuangan maupun barang;
- Pengadaan aplikasi pencatatan aset tetap dan penyusutan lainnya;

# Laporan Kinerja 2024 BPKA

- Koordinasi intensif dengan pemerintah pusat terkait kendala SIPD pada Pemerintah Provinsi Aceh guna memperoleh solusi.

## **SASARAN STRATEGIS 2** : Intensifikasi dan Ekstensifikasi Dana Pembangunan

Kendala dan solusi yang dihadapi :

1. Terjadi pertumbuhan Pendapatan Asli Aceh (PAA) tahun 2024 sebesar 9,71% dibandingkan dengan tahun 2023. Dari sektor pajak, penerimaan semua jenis pajak melampaui target yang sudah ditetapkan, kecuali Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.
2. Sektor pajak daerah masih merupakan kontributor terbesar dari PAA, dengan persentase mencapai lebih dari 58%.
3. Sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Aceh dan Retribusi Aceh, penerimaan BLUD dan pemanfaatan barang milik daerah dicatat sebagai penerimaan retribusi, sehingga total penerimaan retribusi menjadi jauh meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
4. Terbitnya Qanun, Peraturan Gubernur, serta peraturan turunannya yang terkait pajak dan retribusi berperan penting dalam memperbaiki tata kelola dalam pemungutan pajak dan retribusi, yang pada akhirnya akan meningkatkan PAA.
5. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dan Kesepakatan Bersama dengan Kabupaten/Kota dan Bank Aceh Syariah yang dilakukan tahun ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan PAA ke depan, seiring berlakunya mekanisme opsen mulai tahun 2025.
6. Penambahan kuantitas serta kualitas SDM pada Bidang Pendapatan BPKA juga menjadi prioritas dalam upaya optimalisasi PAA.

# Laporan Kinerja 2024 BPKA

7. Penggunaan Aplikasi SIPD pada penyusunan APBA telah memudahkan pekerjaan penyusunan anggaran, antara lain terhubungnya proses perencanaan dan penganggaran.

## **SASARAN STRATEGIS 3** : Optimalisasi Potensi dan Realisasi Pendapatan Aceh

Kendala dan solusi yang dihadapi :

1. Kontribusi PAA sebesar 28,12% terhadap APBA 2024, meningkat sebesar 0,37% dibandingkan tahun 2023.
2. Kenaikan tersebut disebabkan meningkatnya penerimaan dari sektor pajak, yaitu sebesar Rp. 139.372.495.130, dengan peningkatan paling signifikan terdapat pada sektor BBNKB. Hal ini dipicu oleh penerapan tarif BBNKB pertama di tahun 2025 yang meningkat sebesar 5,94% dikarenakan berlakunya opsen BBNKB, sehingga masyarakat memilih untuk membeli kendaraan baru pada tahun 2024.

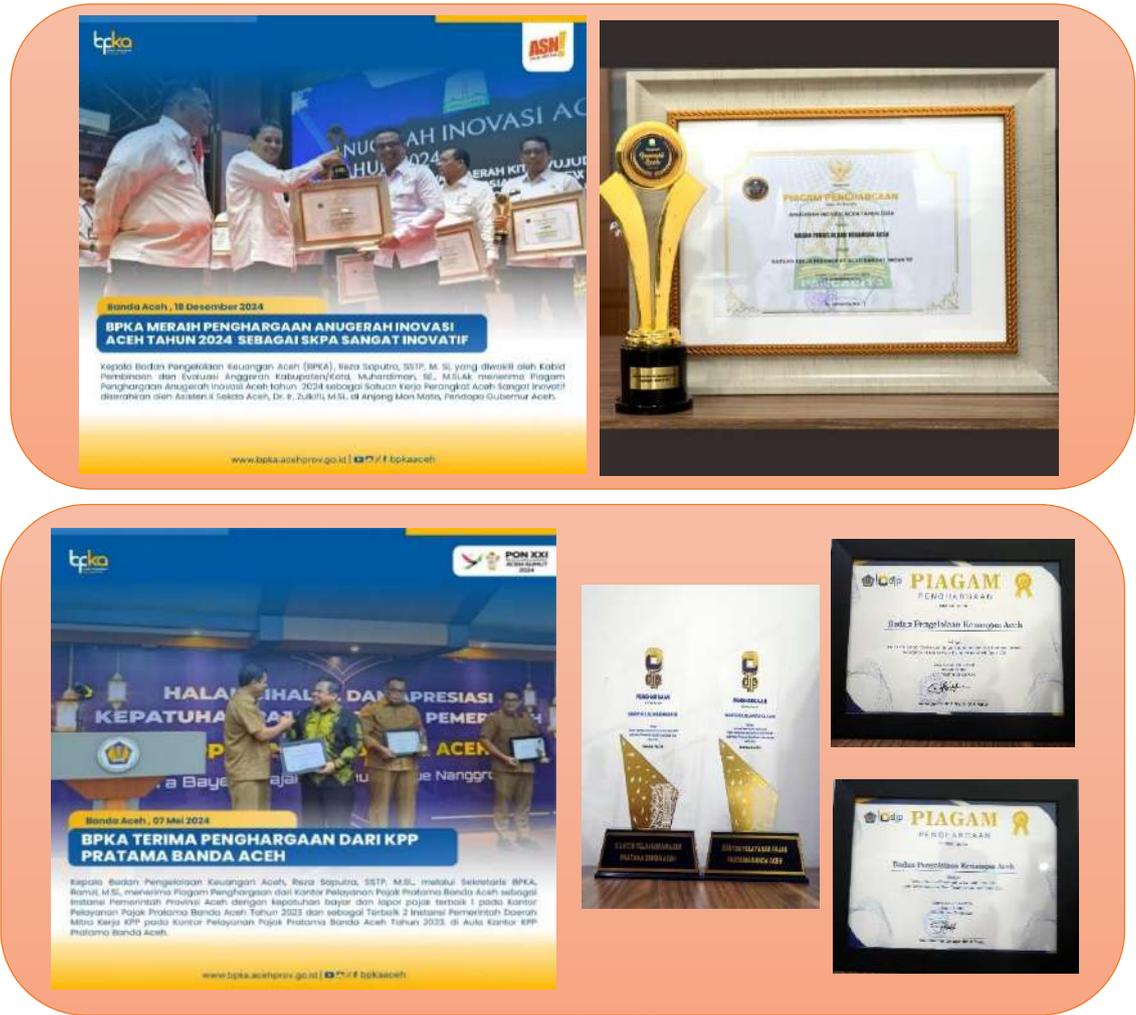
## 5. **Prestasi Daerah/Penghargaan**

Adapun prestasi/penghargaan yang diterima Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Tahun 2024 antara lain dapat kita lihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5  
Prestasi Daerah/Penghargaan Tahun 2024  
Badan Pengelolaan Keuangan Aceh

<b>Prestasi /Penghargaan yang Diperoleh Tahun 2024</b>		
1.	Penghargaan Anugerah Inovasi Aceh Tahun 2024 sebagai SKPA Sangat Inovatif	Pemberi penghargaan : Pj. Gubernur Aceh
2.	Penghargaan sebagai Instansi Pemerintah dengan kepatuhan bayar dan lapor pajak terbaik 1 Tahun 2023 (diterima 7 Mei 2024)	Pemberi penghargaan : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh
3.	Penghargaan Terbaik 2 Instansi Pemerintah Daerah mitra kerja KPP Tahun 2023 (diterima 7 Mei 2024)	Pemberi penghargaan : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh

# Laporan Kinerja 2024 BPKA



Gambar 3.1 Prestasi/Penghargaan Tahun 2024

## 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dengan rata-rata kinerja realisasi 0,14%, capaian kinerja 0,59%, dan capaian anggaran 73,42% sehingga tingkat efisiensi (43,90%) Badan Pengelolaan Keuangan Aceh di Tahun 2024 ini telah berusaha untuk mencapai tujuan seperti yang tertuang pada Rencana Pembangunan Aceh (RPA) 2023 – 2026.

Adapun rincian efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat pada tabel berikut :

# Laporan Kinerja 2024 BPKA

Tabel 3.6  
Pencapaian Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi				Tingkat Efisiensi (%)
			Kinerja	Anggaran (Rp.)	Kinerja	Capaian (%)	Anggaran (Rp.)	Capaian (%)	
1	Mempertahankan Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan pada Level WTP	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	15.595.692.181	-	-	13.628.636.921	87,39	-
2	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Dana Pembangunan	Pertumbuhan per Tahun (APBA dan PAA)	10%	27.665.240.490	4,64%	0,46	18.448.255.898	66,68	(66,22)
3	Optimalisasi Potensi dan Realisasi Pendapatan Aceh	Persentase Kontribusi Pendapatan Asli Aceh terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh	26,30%	24.382.261.535	28,12%	106,93	16.135.765.572	66,18	40,75
Rata-rata tingkat capaian					16,38	53,70	73,42	(8,49)	

Sumber Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (unaudited)

## 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

**SASARAN STRATEGIS 1** : Mempertahankan Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan pada Level WTP

Program : Program Pengelolaan Keuangan Daerah

- Kegiatan : Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
  - Sub Kegiatan :
    1. Koordinasi Dan Penyusunan KUA Dan PPAS
    2. Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan KUA Dan Perubahan PPAS
    3. Koordinasi, Penyusunan Dan Verifikasi RKA-SKPD
    4. Koordinasi, Penyusunan Dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
    5. Koordinasi, Penyusunan Dan Verifikasi DPA- SKPD
    6. Koordinasi, Penyusunan Dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD

## **Laporan Kinerja 2024 BPKA**

7. Koordinasi Dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD Dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBA
  8. Koordinasi Dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD
  9. Koordinasi Dan Penyusunan Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran
  10. Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi
- Kegiatan : Koordinasi Dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
    - Sub Kegiatan :
      1. Koordinasi Dan Pengelolaan Kas Daerah
      2. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, Dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan Dan Dana Transfer Lainnya
      3. Rekonsiliasi Data Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan Dan Pematangan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait
      4. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan Yang Berkaitan Dengan Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
  - Kegiatan : Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah
    - Sub Kegiatan :
      1. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Daerah
      2. Rekonsiliasi Dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-Lo, Dan Beban

# Laporan Kinerja 2024 BPKA

3. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan Dan Semesteran
4. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD Dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
5. Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Apbd
6. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi
7. Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi

Program : Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

- Kegiatan : Pengelolaan Barang Milik Daerah
  - Sub Kegiatan :
    1. Penyusunan Standar Harga
    2. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
    3. Penatausahaan Barang Milik Daerah
    4. Pengamanan Barang Milik Daerah
    5. Penilaian Barang Milik Daerah
    6. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Dan Penghapusan Barang Milik Daerah

**SASARAN STRATEGIS 2** : Intensifikasi dan Ekstensifikasi Dana  
Pembangunan

Program : Program Pengelolaan Keuangan Daerah

- Kegiatan : Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
  - Sub Kegiatan :
    1. Koordinasi Dan Penyusunan KUA Dan PPAS
    2. Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan KUA Dan Perubahan PPAS
    3. Koordinasi, Penyusunan Dan Verifikasi RKA-SKPD

# Laporan Kinerja 2024 BPKA

4. Koordinasi, Penyusunan Dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
5. Koordinasi, Penyusunan Dan Verifikasi DPA- SKPD
6. Koordinasi, Penyusunan Dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
7. Koordinasi Dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD Dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBA
8. Koordinasi Dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD
9. Koordinasi Dan Penyusunan Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran
10. Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi

Program : Pengelolaan Pendapatan Daerah

- Kegiatan : Pengelolaan Pendapatan Daerah
  - Sub Kegiatan :
    1. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
    2. Analisa Dan Pengembangan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
    3. Penyuluhan Dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
    4. Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
    5. Pengolahan, Pemeliharaan, Dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
    6. Pelayanan Dan Konsultasi Pajak Daerah
    7. Penelitian Dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
    8. Penagihan Pajak Daerah
    9. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah

# Laporan Kinerja 2024 BPKA

10. Pengendalian, Pemeriksaan Dan Pengawasan Pajak Daerah
11. Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah
12. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

## **SASARAN STRATEGIS 3** : Optimalisasi Potensi dan Realisasi Pendapatan Aceh

Program : Pengelolaan Pendapatan Daerah

- Kegiatan : Pengelolaan Pendapatan Daerah
  - Sub Kegiatan :
    1. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
    2. Analisa Dan Pengembangan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
    3. Penyuluhan Dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
    4. Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
    5. Pengolahan, Pemeliharaan, Dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
    6. Pelayanan Dan Konsultasi Pajak Daerah
    7. Penelitian Dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
    8. Penagihan Pajak Daerah
    9. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
    10. Pengendalian, Pemeriksaan Dan Pengawasan Pajak Daerah
    11. Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah
    12. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

## **B. Realisasi Anggaran**

Di Tahun 2024 Badan Pengelolaan Keuangan Aceh sebagai unsur penunjang urusan pemerintah Aceh di bidang Keuangan dengan 4 (empat) Program, 15 (lima belas) Kegiatan, 68 (enam puluh delapan)

# Laporan Kinerja 2024 BPKA

Sub Kegiatan dan pagu anggaran sebesar Rp.2.065.615.777.461,24 yang terdiri dari :

Tabel 3.7  
Alokasi dan Realisasi Belanja berdasarkan Jenis Belanja

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
			(Rp)	(%)
	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>2.065.615.777.461,24</b>	<b>1.995.276.249.025,45</b>	<b>96,59</b>
1	BELANJA OPERASI	1.152.168.944.718,63	1.093.111.698.259,00	94,87
2	BELANJA MODAL	23.732.688.292,61	21.025.752.899,00	88,59
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	8.595.194.981,00	19.848.398,45	0,23
4	BELANJA TRANSFER	881.118.949.469,00	881.118.949.469,00	100

Sumber Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (unaudited)

Artinya 96,59% dari pagu anggaran di tahun 2024 dapat diserap dengan baik untuk mencapai tujuan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.

Adapun anggaran yang dipergunakan untuk mencapai target pada Perjanjian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8  
Anggaran yang Dipergunakan untuk Mencapai Target pada Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	PAGU TAHUN ANGGARAN 2024 (Rp.)	REALISASI TAHUN ANGGARAN 2024 (Rp.)	PERSENTASE
1	2	3	4	5
1	Mempertahankan Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan pada Level WTP	15.595.692.181	13.628.636.921	87,39
2	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Dana Pembangunan	27.665.240.490	18.448.255.898	66,68
3	Optimalisasi Potensi dan Realisasi Pendapatan Aceh	24.382.261.535	16.135.765.572	66,18
Rata-rata Realisasi Anggaran				<b>73,42</b>

Sumber Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (unaudited)

Pada sasaran Mempertahankan Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan pada Level WTP, penggunaan anggaran untuk mencapai indikator ini sebesar 87,39% atau sebesar Rp.15.595.692.181,- yang artinya hanya 12,61% atau Rp. 1.967.055.260,- dari jumlah anggaran yang tidak terealisasi.

## **Laporan Kinerja 2024 BPKA**

Untuk sasaran Intensifikasi dan Ekstensifikasi Dana Pembangunan penggunaan anggaran untuk mencapai indikator ini anggaran yang digunakan sebesar Rp.18.448.255.898,- atau sebesar Rp. 66,68% dan sebesar 33,32% tidak terealisasi.

Pada sasaran Optimalisasi Potensi dan Realisasi Pendapatan Aceh, anggaran yang digunakan sebesar Rp. 16.135.765.572,- atau 66,18% dari jumlah anggaran yang tersedia yang artinya hanya Rp. 8.246.495.963,- atau 33,82% yang tidak terealisasi.



# Laporan Kinerja 2024 BPKA

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Tahun 2024 disusun guna memenuhi salah satu prinsip governance yaitu transparansi dan akuntabilitas. Gambaran mengenai keberhasilan beserta faktor pendukungnya dan kegagalan beserta faktor penghambatnya baik dari sisi internal yang controllable maupun sisi eksternal yang uncontrollable dapat dijadikan feedback bagi upaya perbaikan dimasa yang akan datang.

Untuk mencapai akuntabilitas kinerja yang maksimal, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh terus berusaha melaksanakan tugas dan fungsi sebaik mungkin dengan harapan dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan Aceh secara optimal melalui pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan evaluasi kinerja Tahun 2024, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya terdapat 3(tiga) sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, walaupun belum semua dapat terealisasi dengan maksimal.

Secara keseluruhan rata-rata kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh 16,38%, capaian kinerja sebesar 53,70% dan rata-rata capaian anggaran 73,42% dengan tingkat efisiensi minus 8,49%. Hasil pengukuran kinerja yang mengacu pada Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis Mempertahankan Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan pada Level WTP, belum adanya hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh menjadi kendala dalam mengukur capaian kinerja. Adapun capaian anggarannya sebesar 87,39%.
2. Sasaran Strategis Intensifikasi dan Ekstensifikasi Dana Pembangunan dengan indikator kinerja Pertumbuhan per Tahun (APBA dan PAA) dengan realisasi kinerja 4,64% sehingga capaian kinerja 0,46% dan capaian anggaran 66,68%, tingkat efisiensi sebesar minus 66,22%.
3. Sasaran Strategis Optimalisasi Potensi dan Realisasi Pendapatan Aceh dengan indikator Persentase Kontribusi Pendapatan Asli Aceh terhadap

# Laporan Kinerja 2024 BPKA

Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dengan target kinerja 26,30%, terealisasi 28,12%, capaian kinerja 106,93%, capaian realisasi anggaran 66,18% sehingga tingkat efisiensi sebesar 40,75%.

Keberhasilan pelaksanaan seluruh program tidak terlepas dari pengaruh keadaan, dukungan dan peran serta seluruh pihak yang berkepentingan dan tugas Badan Pengelolaan Keuangan Aceh ke depan adalah meningkatkan kinerja yang ada menjadi semakin baik ini serta terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, peningkatan pendapatan Aceh dengan inovasi-inovasi terkini dan semakin tertibnya penataan aset-aset daerah guna memaksimalkan pelayanan publik. Umpan balik (feed back) atas segala yang kami sajikan dan saran-saran sangat kami harapkan guna peningkatan akuntabilitas kinerja yang lebih baik dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, kepada seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas Badan Pengelolaan Keuangan Aceh kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

## 4.2 Upaya dimasa mendatang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan hasil kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh antara lain :

1. Melaksanakan penerbitan SP2D secara Paperless dan Digital Signing.
2. Tetap menjalin kerjasama dan koordinasi yang baik dengan pihak-pihak yang terkait dalam proses penerbitan SP2D.
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui sosialisasi, bimtek, diklat.
4. Memperluas basis pajak.
5. Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
6. Meningkatkan sarana dan prasarana IT.
7. Elektronifikasi pajak (pembayaran non tunai, e-PAP, e-PBBKB, e-Retribusi, dll)
8. Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, dan sejenisnya.

## **Laporan Kinerja 2024 BPKA**

9. Untuk Kantor Samsat yang masih menyewa gedung ruko dapat diprioritaskan pembangunan gedung samsat.
10. Berkoordinasi dengan tim Penilai Pemerintah untuk menilai atas Barang Milik Aceh yang ingin dimanfaatkan.
11. Melaksanakan kegiatan rekonsiliasi dengan pengurus barang pengguna setiap triwulan
12. Memasang tanda kepemilikan atas tanah-tanah yang idle.

Banda Aceh, 2025  
Kepala Badan Pengelolaan  
Keuangan Aceh

**REZA SAPUTRA, SSTP, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19800103 199810 1 002





# Laporan Kinerja 2024 BPKA



**Banda Aceh, 2 Mei 2024**

**PROSES IMPLEMENTASI PEMBAYARAN NON TUNAI OLEH BANK ACEH SYARIAH TERKAIT RETRIBUSI ACEH**

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, Reza Saputra, SSTP, M.Si, melalui Kasubid Pengembangan PA, Dajwi, SE, M.Si, melaksanakan rapat tindak lanjut proses implementasi pembayaran non tunai oleh PT. Bank Aceh Syariah terkait Retribusi Aceh via zoom, dalam rangka Percepatan Implementasi Elektrifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) pada SKPA selaku pemungut Retribusi Aceh bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Aceh yang bertempat di ruang Aula BPKA lantai 1.

www.bpkacehprov.go.id | f bpkaceh



**Takengon, 29 Mei 2024**

**PENDAMPINGAN PENYUSUNAN NERACA AWAL BLUD SMK WILAYAH KBUPATEN BENER MERIAH DAN ACEH TENGAH**

Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan Aceh melaksanakan kegiatan Pendampingan penyusunan neraca awal BLUD Sekolah Menengah Kejuruan Wilayah Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah yang merupakan tindak lanjut dari LHP BPK-R. Kepala Bidang Akuntansi, Hasananda Maulina, SE, M.Si, melalui para Tenaga Teknis dan Staf Bidang Akuntansi BPKA menjadi pemateri dalam acara tersebut serta turut di hadiri oleh Kepala LPTD PTRK Dinas Pendidikan Aceh, Azrah, M.Pd, dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Aceh Tengah, Drs. Khalidin, M.Pd. Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Cabdin Aceh Tengah.

www.bpkacehprov.go.id | f bpkaceh



**Banda Aceh, 21 Juni 2024**

**RAPAT PEMBAHASAN INTEGRASI APLIKASI "SYEDARA" (SYSTEM ELEKTRONIC PENDAPATAN RAKYAT ACEH)**

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), Reza Saputra, SSTP, M.Si, melalui Kabid Pendapatan Asli Aceh, Saumi Effza, SE, M.Si, Ak., memimpin rapat Pembahasan Integrasi Aplikasi "SYEDARA" (System Electronic Pendapatan Rakyat Aceh) dengan Tata Kelola Penganggaran, Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Aceh tindak lanjut rencana kerjasama antar Pemerintah Aceh dengan PT. Bank Aceh Syariah terkait Elektrifikasi Transaksi Pemerintah daerah (ETPD) dalam rangka meningkatkan efisiensi operasional pengelolaan data dan pelaporan Pendapatan Daerah. Rapat ini dilaksanakan di ruang Rapat Bidang Pendapatan lantai 3 BPKA.

www.bpkacehprov.go.id | f bpkaceh



**Banda Aceh, 28 Juni 2024**

**DISKUSI PERHAL QANUN ACEH NOMOR 4 TAHUN 2024 TERKAIT TARIF PBBKB**

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), Reza Saputra, SSTP, M. Si, menghadiri Forum Diskusi Perihal Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2024 Terkait Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) ditetapkan sebesar 7,5% di Provinsi Aceh bersama PT. Pertamina Putra Niaga di Hotel Hermes Palace Banda Aceh.

www.bpkacehprov.go.id | f bpkaceh



**Banda Aceh, 24 Juni 2024**

**SHARING SESSION DAN FGD PENGELOLAAN BLUD SERTA STRATEGI OPTIMALISASI PENGELOLAAN BMD DALAM RANGKA PENINGKATAN PAD**

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), Reza Saputra, SSTP, M. Si, diwakili Kepala Bidang Pendapatan, Saumi Effza, SE, M.Si, Ak., membuka kegiatan Sharing Session dan FGD Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) serta strategi optimalisasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Aula Lt 5 Gedung D, Komplek GKN Banda Aceh.

www.bpkacehprov.go.id | f bpkaceh

# Laporan Kinerja 2024 BPKA



**Banda Aceh, 5 Juli 2024**

**RAKOR KEGIATAN RAZIA PENERTIBAN ADMINSTRASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI ACEH**

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), Reza Saputra, SSTP, M. Si, membuka Rapat Koordinasi Kegiatan Razia Penertiban Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor di Aceh bersama Kepala UPTD Pendapatan Asli Aceh / Samsat Kabupaten/Kota Se Aceh di ruang Aula BPKA, Lantai 1, Banda Aceh.

[www.bpkacehprov.go.id](http://www.bpkacehprov.go.id) | [fb](https://www.facebook.com/bpkaceh) | [ig](https://www.instagram.com/bpkaceh) | [yt](https://www.youtube.com/bpkaceh)



**Banda Aceh, 10 Juli 2024**

**RAPAT EVALUASI TERHADAP RANPERDA KAB/KOTA TENTANG APBD**

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), Reza Saputra, SSTP, M. Si, melalui Sekretaris BPKA, Romzi, M. Si, menyampaikan sambutan sekaligus membuka Rapat Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/kota tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Kegiatan ini merupakan dari Dana Dekonsentrasi, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) melalui Bidang Pembinaan Evaluasi Anggaran Kabupaten/Kota, dan dihadiri Kabid Anggaran dan Kabid Akuntansi BPKD se Aceh.

[www.bpkacehprov.go.id](http://www.bpkacehprov.go.id) | [fb](https://www.facebook.com/bpkaceh) | [ig](https://www.instagram.com/bpkaceh) | [yt](https://www.youtube.com/bpkaceh)



**Jakarta, 10 Juli 2024**

**WORKSHOP PENERTIBAN DANA ABADI DAERAH**

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), Reza Saputra, SSTP, M. Si, bersama Kabid Perbendaharaan, Nelly Diklikiana, SE, M.Si, Ak., menghadiri workshop Penertiban Dana Abadi Daerah (DAD) dalam rangka untuk memberikan pemahaman lebih luas bagi stakeholder di pemerintah Pusat dan Daerah dalam hal penguatan kebijakan maupun dalam hal pembentukan dan pengelolaan DAD secara optimal. Kegiatan ini berlangsung di Mandarin Oriental Jakarta.

[www.bpkacehprov.go.id](http://www.bpkacehprov.go.id) | [fb](https://www.facebook.com/bpkaceh) | [ig](https://www.instagram.com/bpkaceh) | [yt](https://www.youtube.com/bpkaceh)



**Takengon, 20 Agustus 2024**

**SOSIALISASI PENERAPAN OPSEN PKB DAN OPSEN BBNKB DALAM PENYUSUNAN APEK TAHUN ANGGARAN 2025**

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), Reza Saputra, SSTP, M. Si, diwakili Kepala Bidang Pembinaan dan Evaluasi Anggaran Kabupaten/Kota Muhandiman, SE, M. Si menyampaikan sambutan sekaligus membuka kegiatan "Sosialisasi Penerapan Opsen PKB dan Opsen BBNKB dalam Penyusunan APEK TA 2025". Kegiatan ini melalui Bidang Pembinaan Evaluasi Anggaran Kabupaten/Kota, dihadiri Kabid Anggaran dan Kabid Pendapatan BPKD se Aceh dengan tujuan sinkronisasi alokasi anggaran terutama dari jenis Opsen PKB dan BBNKB dalam Penyusunan APEK TA 2025. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Parkside Takengon.

[www.bpkacehprov.go.id](http://www.bpkacehprov.go.id) | [fb](https://www.facebook.com/bpkaceh) | [ig](https://www.instagram.com/bpkaceh) | [yt](https://www.youtube.com/bpkaceh)



**SHARING SESSION DAN FGD**

**MANAJEMEN BUDGET BERKUALITAS DAN OPTIMALISASI MANAJEMEN DAERAH DALAM MENYINGKATKAN PAD**

# Laporan Kinerja 2024 BPKA



**Aceh Jaya, 12 Juni 2024**  
**MENINJAU LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN KANTOR UPTD/SAMSAT WIL. XVIII ACEH JAYA**

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), Reza Saputra, SSTP, M. Si, bersama Komisi III DPR Aceh didampingi Sekda Aceh Jaya meninjau beberapa lokasi untuk pembangunan kantor UPTD/Samsat Wil. XVIII Aceh Jaya.



**Banda Aceh, 12 September 2024**  
**PEMAPARAN PROSES BISNIS PERENCANAAN APBA TAHUN 2020-2024 BERSAMA BPK RI**

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), Reza Saputra, SSTP, M. Si, diwakili Kepala Bidang Perencanaan, Nelly Dikrifiana SE, M.Si, melaksanakan rapat Pemaparan Proses Bisnis Perencanaan APBA Tahun 2020 sampai dengan 2024 bersama BPK RI di Ruang Rapat Kepala BPKA.



**Banda Aceh, 10 Agustus 2024**  
**MEMPERINGATI HUT SAMSAT KOTA BANDA ACEH YANG KE 45 TAHUN**

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), Reza Saputra, SSTP, M. Si, Membuka kegiatan memperingati Hari Ulang Tahun Samsat Kota Banda Aceh yang ke 45 Tahun untuk hadir Tim Pemrisa Samsat lainnya yaitu Pokda Aceh, PT. Jasa Rahajaya Cabang Aceh, Bank Aceh Syariah, B. Serta para undangan Kepala UPTD PAA /Samsat Se Aceh dan para Wajib Pajak. Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Samsat Kota Banda Aceh.



**Banda Aceh, 16 Oktober 2024**  
**BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH (BMD)**

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), Reza Saputra, SSTP, M. Si, Membuka Acara Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang di selenggarakan Bidang Pengelolaan Barang Milik Aceh (PBMA) BPKA, dengan narasumber Khayrady Indra Putra, S.H., M.H., selaku Asetis Perdatu dan Toto Usaha Negara Kabupaten Tinggi Aceh. Binarik ini di ikuti oleh para pengurus barang SOPA di lingkungan Pemerintahan Aceh bertujuan untuk terbanya penerapan dan penguatan BMD. Kegiatan berlangsung di hotel The Park Aceh Besar, dari tanggal 16 s.d 18 Oktober 2024.

[www.bpk.aecprov.go.id](http://www.bpk.aecprov.go.id) | [fb](https://www.facebook.com/bpkaceh) | [ig](https://www.instagram.com/bpkaceh) | [yt](https://www.youtube.com/bpkaceh)



**Banda Aceh, 05 Desember 2024**  
**DIALOG RADIO SERAMBI FM DENGAN TEMA "PEMUTIHAN PKB DAN BBNKB"**

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), Reza Saputra, SSTP, M. Si, bersama Kepala Jasa Rahajaya Cabang Aceh, Bapak Denny Koesprayitno ST, M. Kom, CFP, PIA, CPA, ITIL., Kade STNK Dirlantas Polda Aceh, Kompol Ferdi Doko, S.I.K., dan Ka. UPTD PPA Wil. 1 Banda Aceh, Muhammad Rizal, ST, MT, Menjadi Narasumber di acara Dialog Radio Serambi FM terkait Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kantor Serambi Indonesia – Aceh Besar.

[www.bpk.aecprov.go.id](http://www.bpk.aecprov.go.id) | [fb](https://www.facebook.com/bpkaceh) | [ig](https://www.instagram.com/bpkaceh) | [yt](https://www.youtube.com/bpkaceh)

# Laporan Kinerja 2024 BPKA

## OPSEN PKB



# Laporan Kinerja 2024 BPKA

**KENAPA BAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR LEWAT APLIKASI SIGNAL?**

- 1 FLEKSIBEL**  
BAYAR KAPAN SAJA DAN DIMANA SAJA
- 2 DATA AMAN**  
SUDAH TERDAPAT FACE RECOGNITION (VERIFIKASI WAJAH) DAN VERIFIKASI E-KTP!
- 3 GAMPANG**  
DOKUMEN FISIK DIKIRIMKAN KE ALAMAT TUJUAN
- 4 TIDAK TAKUT DENDA**  
SIGNAL BISA DIGUNAKAN BAHKAN SAAT HARI LIBUR SEKALIPUN

**AYO BAYAR PAJAK KENDARAAN MELALUI**

**SAMSAT DIGITAL NASIONAL**

TUTORIAL PENGGUNAAN APLIKASI SIGNAL KUNJUNGI  
<https://samsatdigital.id/tutorial>

GET IT ON Google Play | Download on the App Store

Jasa Raharja Aceh  
[www.jasaraharja.co.id](http://www.jasaraharja.co.id)

**AHHLAH**  
AKSI BERSAMA SAMA MELAKUKAN LAYANAN BERKUALITAS

**Manfaatkan**

# PEMUTIHAN

Karena Tahun Depan PKB Naik & BBNKB Kendaraan Baru Naik, Manfaatkan Kesempatan Ini

*Berlaku Sampai Dengan*  
**04 Januari 2025**

- 1 Bebas** Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB II)
- 2 Bebas** Denda Pajak Kendaraan Bermotor
- 3 Bebas** Pajak Progresif untuk Kendaraan >250cc/Lebih
- 4 Pajak Mati di atas 2 Tahun**, Cukup Bayar 2 Tahun Saja Tanpa Denda

**Dr. SAFRIZAL ZA, M.Si**  
Pj Gubernur Aceh

**REZA SAPUTRA, SSTP., M.Si.**  
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh

[www.bpkacehprov.go.id](http://www.bpkacehprov.go.id) | [bpkaceh](https://www.facebook.com/bpkaceh)



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **REZA SAPUTRA, SSTP, M.Si**  
Jabatan : **KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **BUSTAMI, S.E., M.Si**  
Jabatan : **Pj. GUBERNUR ACEH**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Aceh, April 2024

PIHAK KEDUA

  
**BUSTAMI, S.E., M.Si**

PIHAK PERTAMA

  
**REZA SAPUTRA, SSTP, M.Si**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH**

NO	SASARAN STRATEGIS		TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mempertahankan opini audit BPK atas laporan keuangan pada level WTP	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP
2.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Dana Pembangunan	Pertumbuhan 10% per tahun APBA PAA	9,4% 5,4%
3.	Optimalisasi Potensi dan Realisasi Pendapatan Aceh	Persentase Kontribusi Pendapatan Asli Aceh terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh	26,3%

**Program :**

	<u>Anggaran</u>
1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 1.932.172.432.049,-
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 4.696.643.427,-
3. Program Peningkatan Pendapatan Aceh	Rp. 23.234.588.135,-
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 142.097.663.444,-

Pj. GUBERNUR ACEH

BUSTAMI, S.E., M.Si

Banda Aceh, April 2024  
KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN ACEH

REZA SAPUTRA, SSTP, M.Si



PEMERINTAH ACEH  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH**

Jalan Teuku Nyak Arief Nomor 219 Banda Aceh 23125  
Kantor Gubernur Aceh Gedung D  
Telp: (0651) 7551045 fax: (0651) 7551046  
website: bpka.acehprov.go.id email:sandi\_bpka@acehprov.go.id

**PENGUKURAN KINERJA**

PROVINSI : ACEH  
SKPA : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH  
TAHUN : 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1.	Mempertahankan opini audit BPK atas Laporan Keuangan pada Level WTP	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	-	-
2.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Dana Pembangunan	Pertumbuhan per tahun APBA PAA	9,4% 5,4%	0,44% 8,85%	0,047% 163,83%
3.	Optimisasi Potensi dan Realisasi Pendapatan Aceh	Persentase Kontribusi Pendapatan Asli Aceh terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh	26,3%	28,12%	106,93%

**Program :**

1. Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Pengelolaan Barang Milik Daerah
3. Pengelolaan Pendapatan Daerah

**Anggaran**

Rp. 1.888.793.428.818,-  
Rp. 4.712.512.777,-  
Rp. 24.382.261.535,-

Banda Aceh, 2025  
Kepala Badan Pengelolaan  
Keuangan Aceh

**REZA SAPUTRA, SSTP, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19800103 199810 1 002